



ANALISIS GERAKAN MODERASI BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA DI ERA DIGITAL

ANALYSIS OF THE MINISTRY OF RELIGION'S RELIGIOUS MODERATION MOVEMENT IN THE DIGITAL ERA

Mursalat

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta-Indonesia
mursalato7@gmail.com

Siswoyo Aris M

STAI Sunan Pandanaran, Indonesia
Jl. Kaliurang Km 12, Candi Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta-Indonesia
siswoyoaris31@gmail.com

Artikel diterima: 21 Agustus 2024, diseleksi: 11 November 2024, disetujui: 16 Desember 2024



Copyright of Journal of Religious Policy: The Office of Religious Research and Development Jakarta, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.

Abstrak

Gerakan Moderasi Beragama yang diluncurkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan salah satu inisiatif penting dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi gerakan tersebut, dampak yang dihasilkan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali berbagai aspek terkait gerakan ini, mulai dari strategi yang digunakan, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, hingga dampak sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan Moderasi Beragama berhasil meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya toleransi dan kerukunan, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti resistensi dari kelompok tertentu dan kesenjangan dalam pelaksanaan di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Moderasi Beragama, Kementerian Agama, Kerukunan Umat, Radikalisme, Toleransi.*

Abstract

The Religious Moderation Movement launched by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia is an important initiative in order to maintain religious harmony in Indonesia. This research aims to analyze the implementation of this movement, the impact it produces, and the challenges faced in its implementation. Through a qualitative approach, this research explores various aspects related to this movement, starting from the strategies used, the involvement of various stakeholders, to the social and cultural impacts that occur in society. The research results show that the Religious Moderation Movement has succeeded in increasing public awareness about the importance of tolerance and harmony, but is still faced with challenges such as resistance from certain groups and gaps in implementation at the local level.

Keywords: Religious Moderation, Ministry of Religion, Community Harmony, Radicalism, Tolerance.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman agama dan budaya yang sangat tinggi, yang telah menjadi ciri khas dan identitas bangsa. Dengan lebih dari 260 juta penduduk yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat pluralisme yang sangat tinggi. Namun, di balik keanekaragaman ini, terdapat potensi konflik yang muncul dari perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan, terutama ketika ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima perbedaan tersebut (Massoweang, 2020).

Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami berbagai tantangan yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan, termasuk meningkatnya ancaman radikalisme dan ekstremisme. Radikalisme agama, yang sering kali didorong oleh interpretasi sempit dan eksklusif terhadap ajaran agama, telah memicu berbagai insiden kekerasan dan intoleransi. Kelompok-kelompok ekstremis, baik lokal maupun internasional, telah berusaha memanfaatkan perbedaan agama sebagai alat untuk memecah belah masyarakat dan melemahkan persatuan nasional (Sobarna, 2020).

Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menjaga kerukunan umat beragama dan menanggulangi paham radikal. Moderasi beragama menjadi konsep kunci yang dapat menjawab tantangan tersebut. Moderasi beragama mengacu pada pendekatan beragama yang menekankan sikap tengah-tengah, menghindari ekstremisme, dan mengedepankan toleransi serta saling pengertian antarumat beragama. Konsep ini juga menekankan pentingnya dialog dan kerja sama lintas agama sebagai cara untuk membangun harmoni dalam masyarakat yang pluralistik (Abidin, 2021; Abror, 2020).

Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam urusan keagamaan, merespons tantangan ini dengan meluncurkan Gerakan Moderasi Beragama. Gerakan ini bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan beragama, memperkuat kerukunan antarumat, dan mencegah penyebaran paham-paham radikal yang dapat mengancam stabilitas sosial (RI, 2019). Praktik moderasi beragama di Indonesia menunjukkan kemajuan yang positif, seiring dengan terjalannya kerukunan antar umat yang semakin kuat. Dengan adanya regulasi baru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, terdapat harapan besar bahwa implementasi program ini akan berlangsung secara lebih sistematis, terencana, dan berkelanjutan (Humas, 2024).

Gerakan Moderasi Beragama tidak hanya mencakup kampanye kesadaran publik, tetapi juga melibatkan berbagai inisiatif strategis seperti pengembangan kurikulum pendidikan yang mendukung moderasi, pelatihan bagi pemuka agama, dan kerja sama dengan organisasi keagamaan serta lembaga pendidikan. Kementerian Agama juga berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam kebijakan publik dan regulasi keagamaan (Ruswand, 2022).

Implementasi Gerakan Moderasi Beragama menghadapi berbagai tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pelanggaran KBB dianggap meningkat, dengan banyak insiden intoleransi terjadi di berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, kasus intoleransi dan pelanggaran KBB sering muncul, terutama di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta. Hampir setiap tahun terjadi insiden semacam itu, sehingga tidak mengherankan jika Setara Institute pada tahun 2019 mencatat Yogyakarta sebagai salah satu daerah dengan tingkat intoleransi tertinggi terkait pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Suryantoro, 2024).

Melihat pentingnya gerakan moderasi beragama ini dalam menjaga persatuan bangsa, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Gerakan Moderasi Beragama diimplementasikan oleh Kementerian Agama, dampak yang dihasilkan dari gerakan ini, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Teori implementasi kebijakan, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan moderasi beragama diimplementasikan oleh

Kementerian Agama di era digital. Fokusnya adalah pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, termasuk dukungan sumber daya dan keterlibatan masyarakat (Mandala et al., 2024). Urgensi penelitian tentang “Analisis Gerakan Moderasi Beragama Kementerian Agama di Era Digital” dapat dijelaskan melalui beberapa alasan spesifik yang berkaitan dengan konteks era digital. *Pertama*, penyebaran informasi yang cepat di era digital menciptakan tantangan baru dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama. Pesan-pesan ekstrem dan intoleran juga dapat dengan mudah diakses dan disebarluaskan, sehingga penting untuk memahami bagaimana gerakan moderasi dapat bersaing dengan narasi ekstremis di ruang digital.

Kedua, generasi muda merupakan pengguna aktif media sosial dan platform digital lainnya. Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana mereka terpapar pada ide-ide moderat atau ekstrem, serta bagaimana gerakan moderasi beragama dapat menarik perhatian dan melibatkan mereka dalam upaya membangun toleransi dan pemahaman antarumat beragama. Terakhir, penelitian ini juga penting untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan secara optimal dalam gerakan moderasi beragama. Ini mencakup penggunaan media sosial, aplikasi mobile, dan platform online lainnya untuk menyebarkan pesan toleransi dan inklusivitas kepada masyarakat luas. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penelitian ini tidak hanya relevan tetapi juga mendesak untuk dilakukan. Dalam konteks era digital yang terus berkembang, pemahaman tentang bagaimana moderasi beragama dapat diterapkan dan dipromosikan menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan harmonis.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai moderasi beragama dengan memberikan analisis yang mendalam tentang bagaimana gerakan ini diimplementasikan dalam konteks era digital. Ini termasuk pemahaman tentang dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi moderasi beragama di kalangan masyarakat dalam memperkuat upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Melalui penelitian ini, peneliti dapat memetakan strategi yang digunakan oleh Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama, serta praktik-praktik terbaik yang muncul dari pelaksanaan program-program tersebut. Ini akan menjadi

referensi penting bagi akademisi dan praktisi dalam bidang pendidikan dan keagamaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Gerakan Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama Republik Indonesia?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: *Pertama*, Menganalisis implementasi Gerakan Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam konteks menjaga kerukunan antarumat beragama. *Kedua*, Menilai dampak dari Gerakan Moderasi Beragama terhadap peningkatan toleransi dan pengurangan konflik antarumat beragama di Indonesia.

Kajian pustaka dalam penelitian ini akan mencakup beberapa literatur terkait pluralisme agama, moderasi beragama, dan tantangan yang dihadapi dalam konteks keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia. Beberapa referensi penting antara lain: *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Edy Sutrisno, dalam penelitiannya membahas Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman, terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Keberagaman ini menuntut adanya toleransi untuk memahami perbedaan yang ada. Dalam konteks lembaga pendidikan, keberagaman kultur warganya juga sangat beragam. Untuk mengimplementasikan moderasi beragama di masyarakat yang multikultural, langkah-langkah yang perlu diambil meliputi menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat laboratorium moderasi beragama dan menerapkan pendekatan sosio-religius dalam konteks beragama dan bernegara (Sutrisno, 2019).

Kedua, karya Rudi Ahmad Suryad yang membahas integrasi moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk penguatan paradigma moderasi, pengembangan kurikulum, dan metode pembelajaran. Ketiga pendekatan ini saling terkait dan berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penerapan moderasi dalam konteks Pendidikan Agama Islam. Kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama Republik Indonesia sangat penting untuk membentuk sikap dan perilaku moderat yang didasari oleh pemahaman agama yang seimbang. Selain itu, moderasi beragama juga dapat diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat keagamaan (Suryadi, 2022).

Ketiga, penelitian mengenai moderasi beragama dan kemenag juga dilakukan oleh Edi Junaedi dengan kajian pustaka yang ditandai dengan peluncuran buku “Moderasi Beragama.” Acara ini berlangsung pada hari Selasa dan dipimpin oleh

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin (LHS) meninggalkan warisan berharga di akhir masa jabatannya melalui buku ini. Kehadiran buku ini bukanlah sekadar formalitas; ide di baliknya berasal dari putra Menteri Agama ke-10 pada masa Orde Lama, KH. Saifuddin Zuhri, yang menjabat dari 6 Maret 1962 hingga 17 Oktober 1967. Hal ini diakui oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat dalam pengantar buku, yang menyatakan bahwa penyusunan buku ini adalah respons terhadap seruan Menteri Agama untuk menyediakan referensi terkait moderasi beragama (Junaedi, 2019).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ari Wibowo membahas radikalisme yang mengatasnamakan agama di Indonesia semakin meluas dan mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Ancaman ini menyebar melalui berbagai saluran media, termasuk media cetak, elektronik, dan media sosial. Oleh karena itu, penting bagi seluruh umat beragama di Indonesia untuk menyadari konsep moderasi beragama. Setiap kelompok agama memiliki tanggung jawab yang sama untuk mempromosikan moderasi beragama di semua platform media, termasuk Facebook. Kampanye moderasi beragama dapat dilakukan dengan menciptakan pesan-pesan yang informatif dan persuasif, baik dalam bentuk tulisan, gambar ilustratif, maupun video edukasi berdurasi pendek. Pengguna Facebook di Indonesia memiliki potensi besar untuk ikut serta dalam menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama. Mereka bahkan dapat mengambil inisiatif untuk membentuk komunitas virtual yang fokus pada upaya moderasi beragama di Indonesia (A. Wibowo, 2019).

Dari penelitian sebelumnya belum ada yang membahas gerakan moderasi beragama yang diluncurkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan salah satu inisiatif penting dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Dengan demikian, kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang mencakup kolaborasi lintas sektor, fokus pada tantangan lokal, pemanfaatan media sosial, integrasi kearifan lokal, serta rekomendasi kebijakan yang praktis untuk meningkatkan efektivitas Gerakan Moderasi Beragama di Indonesia. Fokus utama adalah pada literatur yang membahas moderasi beragama, strategi komunikasi digital, dan penggunaan media sosial dalam konteks keagamaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang dilengkapi dengan analisis terhadap konten media sosial. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana Kementerian Agama mempromosikan moderasi beragama di era digital, khususnya melalui platform media sosial. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan budaya yang kompleks, seperti moderasi beragama, dengan fokus pada makna, persepsi, dan pengalaman yang diungkapkan melalui konten digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali konteks dan dinamika di balik strategi komunikasi Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama melalui media sosial.

Metode studi literatur dalam penelitian ini mencakup pengumpulan, peninjauan, dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan moderasi beragama dan peran media sosial dalam promosi nilai-nilai keagamaan. Peneliti mengumpulkan literatur dari berbagai sumber, termasuk database akademik, perpustakaan, dan situs web resmi Kementerian Agama.

Selain studi literatur, penelitian ini juga melibatkan analisis konten media sosial untuk memahami bagaimana pesan-pesan moderasi beragama disampaikan dan diterima oleh audiens di platform digital. Peneliti mengumpulkan data dari akun media sosial resmi Kementerian Agama, seperti Twitter, Instagram, dan YouTube. Data ini mencakup postingan, video, komentar, dan interaksi pengguna terkait dengan kampanye moderasi beragama, yang dianalisis adalah konten pada tahun 2022-2024 pada media sosial resmi Kementerian Agama. Peneliti melakukan analisis konten terhadap data media sosial yang dikumpulkan. Analisis ini melibatkan identifikasi tema-tema utama, gaya komunikasi, dan respon publik terhadap pesan moderasi beragama. Peneliti juga memeriksa frekuensi, popularitas, dan jangkauan dari setiap postingan untuk menilai efektivitas strategi digital yang digunakan.

Hasil analisis media sosial diinterpretasikan dalam konteks strategi komunikasi Kementerian Agama. Peneliti mengevaluasi seberapa efektif media sosial dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama dan bagaimana respon audiens terhadap pesan-pesan ini mencerminkan penerimaan atau tantangan terhadap moderasi beragama. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti menggunakan sumber yang kredibel dan relevan baik dari literatur maupun data media sosial. Validitas juga ditingkatkan melalui triangulasi data, di mana temuan dari studi literatur dan analisis media sosial

dibandingkan dan dikontraskan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik.

PEMBAHASAN

Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama di Era Digital

Moderasi beragama adalah pendekatan yang mendorong sikap tengah (*wasathiyah*) dalam beragama. Ini berarti tidak condong kepada ekstremisme, baik ekstrem kanan (radikalisme) maupun ekstrem kiri (liberalisme yang mengabaikan nilai-nilai agama). Moderasi beragama mengajarkan bahwa agama seharusnya menjadi sumber perdamaian, kebersamaan, dan keadilan, bukan konflik atau perpecahan. Gerakan Moderasi Beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan sebuah inisiatif penting dalam menjaga harmoni dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Indonesia, sebagai negara dengan keragaman agama, budaya, dan etnis, menghadapi tantangan dalam menjaga perdamaian dan kohesi sosial. Untuk itu, moderasi beragama menjadi strategi kunci dalam meredam potensi konflik dan ekstremisme (Agus, 2019; Faozan, 2020).

Sejumlah praktik intoleran dapat ditemui dalam kehidupan beragama di Indonesia. Misalnya, penolakan kehadiran umat beragama lain di daerah tertentu karena merasa mayoritas, penolakan pendirian rumah ibadah, penolakan tradisi adat oleh kelompok kelompok umat. Contoh yang lain adalah munculnya politik identitas setiap menjelang pesta demokrasi sampai munculnya kelompok berideologi transnasionalisme. Penguatan moderasi beragama telah disepakati bersama menjadi salah satu arah kebijakan negara. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk menciptakan tata kehidupan beragama dan bernegara yang harmonis, rukun, damai, dan toleran. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, penguatan moderasi beragama menjadi sebuah keniscayaan untuk mengelola keragaman tafsir keagamaan yang ekstrem dan mencegah gesekan atau konflik (2023; Khaerun Rijaal, 2021).

Dalam upaya membangun toleransi dan harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia, Kementerian Agama telah meluncurkan gerakan moderasi beragama yang sangat masif. Gerakan ini bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalisir konflik agama, radikalisme, dan ekstremisme, serta meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Kementerian Agama telah melakukan pelatihan dan diklat intensif selama dua tahun terakhir yaitu 2022-

2024 untuk memperkuat pemahaman moderasi beragama di kalangan pegawai dan masyarakat. Program ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman ideal tentang moderasi beragama, memperkuat toleransi, dan mewujudkan kerukunan dalam keberagaman. Strategi ini melibatkan pelatihan kader Mubaligh tingkat nasional, pelatihan kader di tingkat kecamatan, dan kegiatan lainnya untuk mengantisipasi dan meminimalisir adanya konflik agama, radikalisme, dan ekstremisme (Alim, 2020; Khaerun Rijaal, 2021).

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi telah menciptakan realitas baru, baik positif maupun negatif, dan mendisrupsi berbagai aspek kehidupan kita, termasuk kehidupan beragama. Dunia digital telah menembus ruang-ruang privasi umat beragama. Berbagai faham agama mulai dari yang paling kanan (ultra konservatif) sampai yang paling kiri (liberal), bahkan sampai yang ekstrem radikal dapat diakses secara borderless oleh siapapun. Hal ini memungkinkan terjadinya proses transmisi paham keagamaan dari berbagai penjurur dengan bebas, tanpa filter yang di samping membawa manfaat, juga berpotensi merusak paham keagamaan moderat yang selama ini menjadi perekat sosial dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, dalam dunia digital dan media sosial, muncul sejumlah aktor keagamaan baru yang tidak berbasis massa ormas keagamaan dan tidak mengakar yang berpotensi mengabaikan tradisi yang selama ini berkontribusi penting dalam meningkatkan literasi keagamaan dan juga merekatkan kehidupan keagamaan. Disamping itu, dominasi narasi konservatisme agama di media sosial akan mentransmisi paham keagamaan konservatif kepada generasi milenial dan gen Z yang identik dengan dunia digital. Bahkan, tidak jarang penyelenggara negara secara tidak sadar atau kurang pengetahuan melakukan praktik-praktik intoleransi dengan membuat kebijakan perspektif mayoritarianisme dan melupakan perlindungan hak konstitusi warga dengan tidak memfasilitasi umat beragama untuk menjalankan agamanya.

Berbagai fakta di atas mengharuskan kita untuk mengambil langkah untuk menjaga dan merawat paham keagamaan dan keindonesiaan kita. Moderasi beragama yang berorientasi pada kemaslahatan, kemuliaan manusia dan sangat tepat untuk Indonesia yang sangat beragam, harus terus didakwahkan. Kaum moderat harus lebih aktif mengisi ruang-ruang spiritualitas umat. Sebab, dalam dunia digital dan media sosial, sedang berlangsung kontestasi perebutan otoritas keagamaan dan kontestasi memenangkan hati umat. Yang akan keluar sebagai pemenang tidak mesti mereka yang paling benar atau yang paling alim, tapi mereka yang lebih intensif hadir mengisi ruang-ruang spiritualitas umat,

walaupun ilmunya belum tentu luas, dalam, atau bahkan belum tentu benar (Firmansyah, 2024; Khotimah, 2020).

Kementerian Agama Republik Indonesia mengimplementasikan moderasi beragama di era digital, sebuah periode di mana teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama, yang menekankan sikap tengah dalam beragama untuk menghindari ekstremisme, telah menjadi salah satu agenda utama Kementerian Agama dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama di Indonesia. Di era digital, upaya ini menghadapi tantangan baru, seperti penyebaran hoaks dan radikalisme melalui media sosial, yang memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif (2024; RI, 2019).

Kementerian Agama telah meluncurkan berbagai inisiatif digital yang bertujuan untuk mempromosikan moderasi beragama. Salah satu inisiatif utama adalah pengembangan platform e-learning yang menyediakan materi pendidikan agama berbasis moderasi. Platform seperti *e-pesantren* dirancang untuk menjangkau lembaga-lembaga pendidikan agama di seluruh Indonesia, memberikan akses kepada kurikulum yang mendukung nilai-nilai moderat dan inklusif. Selain itu, Kementerian Agama juga aktif di media sosial, menggunakan platform seperti Twitter, Instagram, dan YouTube untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi kepada audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Melalui kampanye ini, Kementerian Agama berupaya merespons isu-isu aktual yang sering kali menjadi sumber konflik antarumat beragama.

Namun, era digital juga membawa tantangan signifikan dalam upaya promosi moderasi beragama. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Literasi digital yang rendah membuat masyarakat lebih rentan terhadap penyebaran hoaks dan radikalisme, yang sering kali disebarluaskan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Ini merupakan tantangan besar bagi Kementerian Agama, yang harus memastikan bahwa informasi yang benar dan moderat dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Rahim & Indah, 2024; Sari & Prasetya, 2022).

Selain literasi digital, penyebaran hoaks dan radikalisme di dunia maya menjadi masalah yang perlu dihadapi dengan serius. Konten-konten yang mengandung ideologi ekstremis sering kali sulit dikendalikan karena internet bersifat terbuka dan anonim. Meskipun Kementerian Agama, bersama dengan lembaga terkait lainnya, telah melakukan upaya untuk memblokir situs-situs radikal, tantangan ini masih berlanjut. Pengawasan dan regulasi konten digital

yang efektif memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan masyarakat (Sholihin & Kurnia, 2023).

Efektivitas program-program Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital dapat dilihat dari beberapa indikator. Capaian dan jangkauan program, seperti jumlah pengguna yang terlibat dalam platform e-learning dan tingkat interaksi di media sosial, merupakan salah satu indikator penting. Selain itu, perubahan persepsi dan sikap masyarakat terhadap moderasi beragama setelah terpapar program-program ini juga menjadi ukuran efektivitas. Survei dan studi kasus dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana program-program ini berhasil meningkatkan toleransi antarumat beragama dan mengurangi insiden kekerasan yang berlatar belakang agama (Hefni, 2020). Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan platform media sosial, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas upaya moderasi beragama. Keterlibatan berbagai pihak ini dapat membantu memperluas jangkauan program-program Kementerian Agama dan memastikan bahwa pesan moderasi beragama diterima oleh masyarakat secara lebih luas (Wulandari, 2024).

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa Kementerian Agama telah melakukan upaya yang signifikan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan moderasi beragama. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi digital yang rendah dan penyebaran konten radikal di dunia maya memerlukan perhatian lebih lanjut. Untuk meningkatkan efektivitas upaya moderasi beragama, Kementerian Agama perlu terus meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap konten digital, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, nilai-nilai moderasi beragama dapat lebih efektif disebarkan dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi target utama di era digital ini (Mandala et al., 2024).

Penggunaan Media untuk Kampanye Moderasi Beragama

Gerakan Moderasi Beragama adalah sebuah inisiatif yang dipelopori oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk mempromosikan pemahaman dan praktik keagamaan yang moderat, toleran, dan inklusif di Indonesia. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kerukunan antarumat beragama di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kementerian Agama juga mengadakan berbagai kegiatan seperti

seminar, workshop, dan diskusi publik untuk menyebarkan pesan moderasi beragama dan mendorong partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Gerakan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman agama dan budaya (Andi Saefulloh et al., 2022; Budiono, 2024).

Dalam konteks aqidah dan hubungan antar umat beragama, moderasi beragama adalah meyakini kebenaran agama sendiri “secara radikal” dan menghargai, menghormati penganut agama lain yang meyakini agama mereka, tanpa harus membenarkannya. Moderasi sama sekali bukan pendangkalan akidah, sebagaimana dimispersepsi oleh sebagian orang. Dalam konteks sosial budaya, berbuat baik dan adil kepada yang berbeda agama adalah bagian dari ajaran agama (*al Mumtahanah ayat 8*). Dalam konteks berbangsa dan bernegara atau sebagai warga negara, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban berdasar agama. Semua sama di mata negara. Dalam konteks politik, bermitra dengan yang berbeda agama tidak mengapa. Bahkan ada keharusan untuk memiliki komitmen terhadap kesepakatan-kesepakatan politik yang sudah dibangun walau dengan yang berbeda agama, sebagaimana dicontohkan dalam pengalaman empiris nabi di Madina dan sejumlah narasi verbal dari nabi (Bari & Jamila, 2023; Haq, 2022).

Moderasi Beragama bertentangan dengan politik identitas dan populisme. Sebab, di samping bertentangan dengan ajaran dasar dan ide moral atau *the ultimate goal* beragama, yakni mewujudkan kemaslahatan, juga sangat berbahaya untuk konteks Indonesia yang majemuk. Dalam konteks intra umat beragama, MB tidak menambah dan mengurangi ajaran agama, saling menghormati dan menghargai jika terjadi perbedaan (apalagi di ruang publik) dengan tetap mengacu pada kaedah-kaedah ilmiah. Tidak boleh atas nama moderasi beragama, semua boleh berpendapat dan berbicara sebebasnya, tanpa menjaga kaedah-kaedah ilmiah dan tanpa memiliki latar belakang dan pengetahuan yang memadai.

Cara beragama moderat seperti inilah yang selama ini menjaga kebhinekaan dan keindonesiaan kita. Gerakan moderasi beragama sangat masif pergerakannya. Pemerintah melalui kementerian agama, secara struktur dan kultur mencoba untuk memasifkan gerakan ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat secara umum. Dalam internal kementerian agama gerakan terhadap pemahaman moderasi beragama sangat terasa. Mulai dari pelatihan dan diklat sangat intens dilakukan sejak dua tahun terakhir dengan materi moderasi beragama.

Kementerian Agama RI memanfaatkan media sebagai salah satu alat utama dalam kampanye Gerakan Moderasi Beragama. Dengan memanfaatkan berbagai platform media, baik tradisional maupun digital, kampanye ini bertujuan untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi secara luas dan efektif kepada masyarakat serta menjangkau khalayak yang lebih luas, terutama generasi muda, dan mengedukasi mereka tentang pentingnya sikap moderat dalam beragama. Beberapa strategi utama yang digunakan dalam kampanye moderasi beragama melalui media. Media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk menjangkau berbagai kalangan, terutama generasi muda. Kementerian Agama menggunakan platform-platform digital untuk menyebarkan konten-konten edukatif yang berisi pesan moderasi. Kementerian Agama mengelola portal resmi dan situs web khusus yang didedikasikan untuk kampanye moderasi beragama. Situs ini menyediakan berbagai sumber daya, termasuk artikel, video, modul pelatihan, dan publikasi tentang moderasi beragama.

Moderasi beragama merupakan konsep yang menekankan pentingnya sikap tengah dalam beragama, menghindari ekstremisme dan radikalisme. Kementerian Agama Republik Indonesia telah menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu agenda utama dalam upaya menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Di era digital, teknologi menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama, namun juga membawa tantangan baru seperti penyebaran hoaks dan radikalisme melalui media sosial.

Kementerian Agama memproduksi berbagai jenis konten edukatif yang dirancang dengan gaya yang menarik dan kreatif, seperti video pendek, infografis, meme, dan cerita interaktif. Konten ini mencakup topik-topik seperti pentingnya toleransi, bagaimana menghargai perbedaan, dan dampak negatif dari radikalisme. Untuk meningkatkan visibilitas pesan moderasi, kampanye tagar (#) seperti #ModerasiBeragama, #IndonesiaRukun, dan #TolakRadikalisme diluncurkan di berbagai platform. Kampanye tagar ini mengajak pengguna media sosial untuk berpartisipasi dalam diskusi dan berbagi konten yang mendukung moderasi beragama.



Gambar 1.
Festival Film Pendek Moderasi Beragama
Sumber: Instagram Balitbang Diklat Kemenag RI

Dalam mendukung konten moderasi beragama Balai Litbang Agama mengadakan Festival Film Pendek Moderasi Beragama 2024 (gambar 1) merupakan salah satu inisiatif dari Balai Litbang Agama Jakarta untuk mendukung program Balitbang Diklat Kementerian Agama RI dalam menciptakan Indonesia yang damai, toleran, dan menghormati perbedaan. Mari kita sambut dan dukung festival ini dengan semangat kebersamaan dan moderasi. Kementerian Agama bekerja sama dengan influencer dan tokoh-tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut di media sosial untuk menyebarkan pesan moderasi. Penggunaan influencer bertujuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mempengaruhi opini publik dengan cara yang positif. Kementerian Agama juga memanfaatkan media cetak untuk menyebarkan pesan moderasi melalui artikel opini, kolom, dan laporan khusus di surat kabar dan majalah. Artikel-artikel ini ditulis oleh para ahli, akademisi, dan pemuka agama yang memaparkan pentingnya moderasi beragama dan menawarkan solusi terhadap tantangan radikalisme (Asrori, 2024; Sya'bani, 2024).

Sebagaimana Kementerian Agama RI menggelar kegiatan Jalan Sehat Kerukunan dan Deklarasi Damai Umat Beragama sebagai bagian dari peringatan

Hari Amal Bhakti Kementerian Agama RI ke-77, dengan tema “Kerukunan Umat untuk Indonesia Sehat.” Habib Husein Ja’far, seorang tokoh agama millennial, turut hadir dan memberikan apresiasi terhadap inisiatif Kemenag ini. Dalam pernyataannya yang dikutip dari situs Kementerian Agama, Habib Husein menekankan bahwa perbedaan adalah kenyataan yang melekat pada Indonesia. Negara ini memiliki keragaman dalam agama, suku, bahasa, dan banyak aspek lainnya, yang dikenal sebagai kebhinekaan dan merupakan berkah dari Tuhan (Fatwa, 2024; Fiardhi, 2021).

Deklarasi tersebut juga memperkuat komitmen kebangsaan, memperkuat moderasi beragama, serta menghindari segala bentuk kebencian. Selain itu Olga Lidya, seorang selebriti Indonesia, juga mengapresiasi pembacaan Deklarasi Damai Umat Beragam. Menurutnya, deklarasi ini menyampaikan pesan kuat tentang pentingnya berbuat baik dan menjaga kedamaian. Presenter televisi tersebut menambahkan bahwa agama seharusnya tidak digunakan untuk memecah belah atau menyebarkan kebencian. Sebaliknya, agama mengajarkan cinta kasih dan memuliakan Tuhan (Fatwa, 2024).

Deklarasi ini ditandatangani oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan tokoh lintas agama, yang mencakup empat poin utama: memperkuat komitmen kebangsaan untuk merawat kebhinekaan, memperkuat moderasi beragama untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, menghindari segala bentuk ujaran kebencian, serta berkomitmen untuk tidak menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye politik praktis, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dampak dari inisiatif Kementerian Agama dalam memproduksi konten edukatif yang menarik dan kreatif, serta peluncuran kampanye tagar moderasi beragama, sangat berpengaruh terhadap masyarakat. *Pertama*, konten yang disajikan dalam bentuk video pendek, infografis, dan meme membuat informasi mengenai toleransi dan menghargai perbedaan lebih mudah dipahami dan diakses oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda. Ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran akan pentingnya moderasi beragama. *Kedua*, kampanye tagar seperti #ModerasiBeragama dan #TolakRadikalisme mendorong partisipasi aktif pengguna media sosial dalam diskusi yang konstruktif. Hal ini menciptakan ruang bagi dialog yang lebih luas, di mana masyarakat dapat berbagi pandangan dan pengalaman terkait moderasi beragama. Dengan demikian, pesan-pesan positif mengenai toleransi dapat menyebar lebih cepat dan luas di kalangan masyarakat.

Ketiga, konten edukatif ini membantu mengurangi potensi radikalisasi dengan memberikan informasi yang menekankan dampak negatif dari ekstremisme. Dengan memfokuskan pada nilai-nilai positif, inisiatif ini berfungsi sebagai alat pencegahan terhadap penyebaran ideologi radikal di kalangan generasi muda. Keempat, inisiatif ini juga meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan adanya konten yang menarik secara visual dan mudah dibagikan di media sosial, masyarakat menjadi lebih terampil dalam menggunakan teknologi untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Ini penting untuk membangun kemampuan kritis dalam menyaring informasi yang diterima.

Sertifikasi Penceramah dalam Upaya Moderasi Beragama

Sebagai bagian dari upaya memastikan pesan moderasi beragama disampaikan dengan benar, Kementerian Agama memperkenalkan program sertifikasi bagi para penceramah agama. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa para penceramah memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama yang moderat dan mampu menyampaikan pesan tersebut kepada jamaah dengan tepat. Sertifikasi penceramah merupakan salah satu inisiatif penting yang diusulkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bagian dari Gerakan Moderasi Beragama. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa penceramah, yang memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran agama kepada masyarakat, menyampaikan pesan-pesan yang moderat, toleran, dan inklusif. Dalam konteks Indonesia yang beragam, sertifikasi penceramah menjadi upaya strategis untuk mencegah penyebaran paham-paham ekstrem dan mendukung terciptanya kerukunan antarumat beragama (BPKH, 2024).

Sertifikasi penceramah menjadi penting karena beberapa alasan utama: *Pertama*, Mencegah Penyebaran Paham Radikal. Penceramah yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran agama atau yang memiliki kecenderungan radikal dapat menjadi sumber penyebaran paham ekstremisme. Dengan sertifikasi, penceramah diwajibkan untuk mengikuti standar tertentu yang memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan agama yang benar dan mampu menyampaikan ajaran yang moderat.

Kedua, meningkatkan profesionalisme penceramah. Sertifikasi juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme penceramah. Melalui program ini, penceramah dilatih untuk memiliki keterampilan komunikasi yang baik, memahami isu-isu sosial yang relevan, dan mampu mengelola dinamika

jamaah yang beragam. Ini akan membuat penceramah lebih efektif dalam menyampaikan pesan agama dan mengelola perbedaan pendapat di kalangan jamaah (Karyudi Sutajah, 2024).

Ketiga, Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan bahwa penceramah akan lebih fokus pada penyampaian pesan-pesan yang mendorong kerukunan, toleransi, dan perdamaian. Ini sangat penting dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama, di mana keberagaman harus dihormati dan dijaga.

Sertifikasi penceramah merupakan langkah strategis dalam upaya mempromosikan moderasi beragama dan mencegah penyebaran paham-paham ekstrem di Indonesia. Dengan menetapkan standar yang jelas dan memberikan pelatihan yang memadai, sertifikasi ini dapat meningkatkan profesionalisme penceramah dan memastikan bahwa mereka menyampaikan pesan-pesan agama yang mendukung kerukunan, toleransi, dan perdamaian. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, dengan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, program sertifikasi penceramah memiliki potensi besar untuk berkontribusi positif terhadap kehidupan beragama di Indonesia.

Proses sertifikasi penceramah melibatkan beberapa tahapan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penceramah. Berikut adalah gambaran umum dari proses ini: Calon penceramah harus mendaftar melalui lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Setelah mendaftar, mereka akan menjalani proses verifikasi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat dasar, seperti pendidikan agama yang memadai dan pengalaman berceramah.

Setelah lolos verifikasi, calon penceramah akan mengikuti pelatihan yang mencakup materi-materi tentang ajaran agama, moderasi beragama, keterampilan komunikasi, dan manajemen jamaah. Setelah pelatihan, mereka akan diuji untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mampu menerapkan materi yang telah dipelajari. Setelah lulus ujian, penceramah akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap mematuhi standar yang telah ditetapkan. Jika lulus semua tahapan, penceramah akan diberikan sertifikat resmi yang menyatakan bahwa mereka telah memenuhi kriteria untuk menyampaikan ceramah agama secara profesional dan moderat.

Indonesia memiliki ribuan penceramah yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Salah satu tantangan adalah memastikan bahwa sertifikasi dapat menjangkau penceramah di daerah-daerah terpencil, yang mungkin memiliki

akses terbatas terhadap program pelatihan dan sertifikasi. Meskipun sertifikasi penceramah memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam implementasinya: Beberapa penceramah mungkin merasa keberatan dengan adanya sertifikasi, baik karena merasa bahwa itu mengurangi otonomi mereka atau karena ketidaksetujuan terhadap standar yang ditetapkan. Untuk mengatasi ini, diperlukan dialog terbuka dan sosialisasi yang menjelaskan pentingnya sertifikasi dalam konteks menjaga kerukunan dan mencegah ekstremisme. Agar sertifikasi diterima luas, prosesnya harus dilakukan secara kredibel dan transparan. Ini berarti bahwa lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi harus independen dan profesional, serta prosesnya harus bebas dari intervensi politik atau kepentingan kelompok tertentu (Karyudi Sutajah, 2024).

Penghargaan dan Pengakuan Bagi Tokoh Moderasi Kementerian Agama

Moderasi beragama telah menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Kementerian Agama, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan kehidupan beragama, telah mengambil berbagai langkah untuk mempromosikan moderasi beragama di tengah masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memberikan penghargaan dan pengakuan kepada tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam mempromosikan moderasi beragama. Penghargaan ini tidak hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai upaya untuk mendorong tokoh-tokoh lain untuk mengambil peran serupa dalam memelihara kerukunan dan perdamaian (R. W. Wibowo & Nurjanah, 2021).

Gerakan ekstremis dan radikal bukanlah bagian dari warisan asli Indonesia. Islam yang berkembang di Indonesia adalah Islam yang mengajarkan perdamaian, yang diperkenalkan oleh para ulama tasawuf yang dikenal dengan Islam yang ramah dan menyejukkan. Gerakan Islam moderat, atau Islam wasatiyah, bertujuan untuk melanjutkan perjuangan ulama terdahulu, seperti KH Hasyim Asy'ari, yang sangat menekankan pemahaman Islam yang moderat. Hal ini menjadi acuan dalam mengembalikan pemahaman wasatiyah di masa kini (Alim, 2020; Azis & Anam, 2021).

Kekayaan intelektual yang ditinggalkan oleh ulama klasik menjadi modal besar dalam dunia pemikiran Islam, dan menjadi referensi untuk menjawab tuntutan zaman. Karya-karya dari imam madzhab, Imam Al-Ghazali, Ibnu Rusyd, dan ulama lainnya, serta pemikiran ulama masa kini seperti Nurcholish

Madjid, KH Abdurrahman Wahid, Prof Syafi'i Ma'arif, dan Prof Quraish Shihab, berperan sebagai filter untuk mengantisipasi gerakan radikal dan ekstremis yang mengancam kerukunan di Indonesia (Alim, 2020).

Pemerintah, melalui Kementerian Agama, sedang menggerakkan kampanye untuk mempromosikan Islam moderat, dengan dukungan dari NU, Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh elit bangsa. Gerakan ini memerlukan keteladanan dari tokoh-tokoh sentral dan dukungan luas dari masyarakat, yang secara alami adalah religius dan cinta damai. Dukungan masyarakat terhadap program pemerintah ini merupakan bentuk loyalitas yang bersifat *bottom-up* (Hakim, 2024).

Untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat, Kementerian Agama memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam menyebarkan moderasi beragama. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya untuk turut serta dalam gerakan ini. Penghargaan bagi tokoh moderasi oleh Kementerian Agama diberikan kepada individu atau kelompok yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam menyebarkan nilai-nilai moderat dalam kehidupan beragama. Tokoh-tokoh ini berperan penting dalam meredam potensi konflik, menyelesaikan perbedaan secara damai, dan mempromosikan dialog antarumat beragama. Mereka juga dianggap sebagai agen perubahan yang mampu menginspirasi masyarakat luas untuk hidup rukun meski di tengah perbedaan (MIMI, 2022).

Penghargaan dan pengakuan bagi tokoh moderasi di Kementerian Agama mencerminkan upaya untuk mengapresiasi individu dan institusi yang berkontribusi dalam penguatan moderasi beragama di Indonesia. Berikut adalah beberapa penghargaan yang telah diberikan: *Pertama*, Lukman Hakim Saifuddin: Mantan Menteri Agama ini menerima penghargaan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Pencetus Moderasi Beragama di Indonesia. Penghargaan ini diberikan pada seminar nasional yang mengangkat tema pendidikan perempuan, sebagai pengakuan atas dedikasinya dalam mempromosikan moderasi beragama selama masa jabatannya (Kemenag, 2024b).

Kedua, Edy Rahmayadi: Gubernur Sumatera Utara ini dianugerahi penghargaan sebagai Tokoh Moderasi Umat Beragama oleh UIN Sumut. Penghargaan ini diberikan karena dinilai berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama di wilayahnya (Julian, 2024). *Ketiga*, Yaqut Cholil Qoumas: Menteri Agama saat ini menerima beberapa penghargaan, termasuk GATRA Award 2023 sebagai Tokoh Transformasi Digital Layanan Keagamaan dan Satria

Transformasi Digital dan Moderasi Beragama pada ajang Satria Brand Award. Penghargaan ini mengakui inovasinya dalam menerapkan transformasi digital di Kementerian Agama (Efendi, 2024). Kementerian Agama RI: Pada tahun 2023, Kemenag memberikan penghargaan kepada berbagai pihak, termasuk Kanwil Kemenag dan perguruan tinggi, sebagai pengakuan atas kontribusi mereka dalam penguatan moderasi beragama. Penghargaan ini diumumkan dalam acara Malam Kebudayaan Konferensi Moderasi Beragama Asia Afrika Amerika Latin di Bandung (Asyad, 2024).

Pengakuan yang diberikan oleh Kementerian Agama tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diikuti dengan program-program pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk memperkuat peran para tokoh moderasi ini. Program-program tersebut mencakup pelatihan, lokakarya, dan seminar yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para tokoh dalam mempromosikan moderasi beragama. Dengan demikian, para penerima penghargaan tidak hanya dihargai atas kontribusi mereka di masa lalu, tetapi juga didorong untuk terus berperan aktif dalam upaya moderasi beragama di masa depan.

Penghargaan dan pengakuan ini memiliki dampak yang signifikan dalam mempromosikan moderasi beragama di Indonesia. *Pertama*, penghargaan ini memperkuat legitimasi para tokoh moderasi di mata masyarakat. Ketika seorang tokoh mendapat pengakuan resmi dari Kementerian Agama, hal itu menambah kredibilitas dan otoritas moral mereka dalam memimpin dan mempengaruhi komunitas. Kedua, penghargaan ini juga mendorong lebih banyak individu dan kelompok untuk terlibat aktif dalam upaya moderasi beragama. Melihat penghargaan yang diberikan kepada rekan-rekan mereka, banyak orang terdorong untuk mengambil peran serupa dalam memajukan nilai-nilai moderat.

Selain itu, penghargaan bagi tokoh moderasi juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat upaya moderasi beragama di tingkat lokal. Di berbagai daerah di Indonesia, tokoh-tokoh yang menerima penghargaan ini sering kali menjadi panutan dalam komunitas mereka. Mereka memimpin berbagai inisiatif lokal yang bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan keagamaan yang dihadapi masyarakat setempat, seperti intoleransi dan radikalisme. Dalam banyak kasus, penghargaan ini menjadi titik awal bagi inisiatif-inisiatif baru yang berfokus pada penguatan moderasi beragama di tingkat akar rumput.

Namun demikian, penghargaan ini juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa proses seleksi dan

pemberian penghargaan dilakukan secara transparan dan adil. Tantangan lainnya adalah bagaimana mengukur dampak jangka panjang dari penghargaan ini terhadap upaya moderasi beragama. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Kementerian Agama perlu terus memperbaiki mekanisme seleksi dan evaluasi, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses ini.

Secara keseluruhan, penghargaan dan pengakuan bagi tokoh moderasi oleh Kementerian Agama adalah langkah penting dalam mempromosikan moderasi beragama di Indonesia. Penghargaan ini tidak hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat peran tokoh-tokoh moderasi dalam menjaga kerukunan dan perdamaian. Dengan terus memperkuat program ini, Kementerian Agama dapat memastikan bahwa nilai-nilai moderat terus berkembang dan menjadi landasan bagi kehidupan beragama yang harmonis di Indonesia.

Peningkatan Kerja Sama Internasional oleh Kementerian Agama

Kementerian Agama juga meningkatkan kerja sama dengan berbagai organisasi internasional yang memiliki visi dan misi serupa dalam mempromosikan moderasi beragama. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan, dan berbagi pengalaman dalam mengelola kerukunan umat beragama. Dengan langkah-langkah ini, Gerakan Moderasi Beragama diharapkan tidak hanya menjadi gerakan yang berkelanjutan di dalam negeri, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam upaya global untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, dan keharmonisan antarumat beragama. Gerakan ini menjadi bagian integral dari upaya bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan keberagaman, sekaligus memperkuat identitas nasional yang inklusif dan beradab (Kemenag, 2024).

Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga dan mempromosikan kerukunan umat beragama di tingkat nasional. Namun, dalam era globalisasi yang semakin kompleks, Kementerian Agama juga melihat perlunya memperluas peran ini melalui peningkatan kerja sama internasional. Kerja sama ini tidak hanya penting untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara lain, tetapi juga untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam pengelolaan kehidupan beragama yang harmonis.

Peningkatan kerja sama internasional oleh Kementerian Agama mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, penelitian, diplomasi, dan pertukaran

budaya. Salah satu aspek utama dari kerja sama ini adalah dalam bidang pendidikan agama, di mana Kementerian Agama bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di Indonesia. Misalnya, Kementerian Agama telah menjalin kemitraan dengan universitas-universitas di negara-negara Islam, seperti Mesir, Arab Saudi, dan Turki, untuk mengirimkan pelajar Indonesia yang ingin mendalami studi Islam di luar negeri. Ini tidak hanya memperkuat pemahaman agama di kalangan masyarakat Indonesia tetapi juga memperkaya perspektif keagamaan dengan menggabungkan pengetahuan dari berbagai tradisi Islam di seluruh dunia.

Selain pendidikan, Kementerian Agama juga aktif dalam penelitian dan pengembangan kebijakan melalui kerja sama dengan lembaga internasional. Misalnya, melalui kolaborasi dengan UNESCO, Kementerian Agama terlibat dalam program-program yang mempromosikan dialog antaragama dan pendidikan untuk perdamaian. Kerja sama ini membantu Indonesia untuk berkontribusi pada upaya global dalam mempromosikan toleransi dan moderasi beragama, sambil belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di negara lain (Khotimah, 2020).

Diplomasi antaragama adalah bidang lain di mana Kementerian Agama memainkan peran penting dalam kerja sama internasional. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sering kali menjadi model bagi negara lain dalam mengelola keragaman agama. Kementerian Agama telah berpartisipasi dalam berbagai forum internasional, seperti Dialog Antaragama dan Antarbudaya yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk berbagi pengalaman Indonesia dalam memelihara kerukunan umat beragama. Melalui diplomasi ini, Kementerian Agama tidak hanya memperkuat hubungan Indonesia dengan negara lain tetapi juga meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang mengedepankan moderasi dan toleransi beragama.

Pertukaran budaya juga merupakan bagian penting dari peningkatan kerja sama internasional oleh Kementerian Agama. Program pertukaran ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam antara Indonesia dan negara lain tentang praktik-praktik keagamaan dan budaya. Misalnya, Kementerian Agama mengundang pemuka agama dari berbagai negara untuk mengunjungi Indonesia dan melihat secara langsung bagaimana kerukunan antaragama dijaga di negara ini. Sebaliknya, pemuka agama Indonesia juga dikirim ke luar negeri untuk mempelajari praktik keagamaan di negara lain. Pertukaran ini membantu

memperkuat hubungan antaragama dan menciptakan jaringan global pemimpin agama yang berkomitmen pada perdamaian dan kerukunan.

Peningkatan kerja sama internasional juga dihadapkan pada tantangan, seperti perbedaan budaya, bahasa, dan kepentingan nasional. Namun, Kementerian Agama terus berupaya untuk mengatasi tantangan ini melalui pendekatan diplomasi yang inklusif dan terbuka. Dengan memperkuat kerja sama internasional, Kementerian Agama tidak hanya memperluas pengaruhnya di panggung global tetapi juga memperkaya kehidupan beragama di Indonesia melalui pembelajaran dari negara lain.

Adapun Dampak Peningkatan Kerja Sama Internasional: *Pertama*, Peningkatan Kualitas Pendidikan: Kerja sama internasional memungkinkan perguruan tinggi keagamaan di Indonesia untuk memperluas jaringan akademik, yang berdampak positif pada kualitas pendidikan. Melalui kolaborasi dengan institusi luar negeri, seperti yang dilakukan oleh lima PTKN Indonesia dengan kampus di Ethiopia, terjadi pertukaran dosen dan mahasiswa serta riset bersama yang meningkatkan mutu pengajaran. Lima perguruan tinggi keagamaan negeri Indonesia menandatangani MoU dengan sejumlah kampus di Ethiopia untuk meningkatkan riset dan pengajaran. Kerja sama ini mencakup pertukaran akademik dan publikasi ilmiah yang saling menguntungkan. *Kedua*, Penguatan Diplomasi: Kerja sama ini juga berperan dalam memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara mitra. Misalnya, kerjasama dengan Ethiopia tidak hanya fokus pada pendidikan tetapi juga mempererat hubungan diplomatik antara kedua negara. Kemenag menjajaki peningkatan kerja sama di bidang agama dan pendidikan tinggi dengan Qatar. Ini mencakup bantuan dari Qatar Foundation dalam pengembangan pendidikan di Indonesia (Khoeron, 2024b).

Ketiga, Dalam pertemuan virtual, Kemenag dan UEA sepakat untuk membentuk tim guna merealisasikan program-program kerjasama di bidang agama, termasuk pengiriman imam masjid dan pencetakan mushaf Al-Qur'an. Diversifikasi Program Keagamaan: Melalui kerjasama dengan Uni Emirat Arab (UEA), Indonesia berupaya menindaklanjuti perjanjian kerja sama di bidang keagamaan yang mencakup pembinaan dai dan pengiriman imam masjid, yang akan memperkaya pengalaman keagamaan di Indonesia (Romadany, 2024).

Keempat, Kemenag mengadakan rapat koordinasi dengan 43 PTKIN untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja sama internasional dan merumuskan langkah-langkah strategis ke depan dalam meningkatkan jaringan internasional. Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi: Kemenag juga mengkaji prospek

kerja sama dengan negara-negara lain untuk memperluas akses pendidikan tinggi, termasuk di kawasan Timur Tengah dan Eropa. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di PTKN melalui standar internasional (Kemenag, 2024a).

Melalui berbagai inisiatif ini, Kementerian Agama tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan tetapi juga pada penguatan hubungan antarnegara yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas. Secara keseluruhan, peningkatan kerja sama internasional oleh Kementerian Agama adalah langkah strategis yang penting dalam mempromosikan moderasi dan kerukunan beragama, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Melalui pendidikan, penelitian, diplomasi, dan pertukaran budaya, Kementerian Agama berupaya untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam mempromosikan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Dengan demikian, kerja sama internasional ini tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia tetapi juga bagi komunitas global yang lebih luas dalam upaya bersama untuk menciptakan dunia yang lebih toleran dan damai.

Strategi Penguatan Fungsi Rumah Ibadah Sebagai Pusat Moderasi

Untuk mengoptimalkan peran rumah ibadah sebagai pusat moderasi, diperlukan strategi-strategi khusus yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak yang terkait, termasuk pemimpin agama, pemerintah, dan komunitas. Pemimpin agama memegang peran sentral dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi di rumah ibadah. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas pemimpin agama sangat diperlukan. Program pelatihan ini dapat mencakup topik-topik seperti teknik penyampaian ceramah yang moderat, cara mengelola dialog antarumat, serta strategi pencegahan radikalisme (Jan & Hasan, 2024).

Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan organisasi keagamaan untuk mengembangkan modul dan materi pendidikan yang mendukung moderasi beragama. Modul ini bisa berupa panduan ceramah, buku saku, atau materi audio-visual yang dapat digunakan oleh pemimpin agama di rumah ibadah. Rumah ibadah dapat difasilitasi untuk menjadi tempat dialog lintas agama. Pemerintah dan organisasi keagamaan dapat menyelenggarakan acara-acara dialog di rumah ibadah, yang melibatkan pemuka agama dan jamaah dari berbagai agama. Ini akan memperkuat ikatan antarumat beragama dan mengurangi potensi konflik (Wahyudiana, 2024).

Komunitas yang terbentuk di sekitar rumah ibadah perlu diberdayakan untuk menjadi agen moderasi. Melalui program-program pemberdayaan, seperti pelatihan kepemimpinan, kegiatan sosial, dan proyek pengembangan masyarakat, komunitas ini dapat berperan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi di lingkungannya. Beberapa contoh implementasi penguatan fungsi rumah ibadah sebagai pusat moderasi yang sudah berjalan di Indonesia dapat dijadikan referensi untuk program-program serupa di daerah lain (Abidin, 2021).

Beberapa masjid di Indonesia telah menginisiasi Majelis Taklim Moderasi, di mana jamaah diajak untuk belajar tentang moderasi beragama melalui kajian-kajian agama yang menekankan nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Majelis ini juga mengadakan diskusi terbuka yang melibatkan tokoh lintas agama untuk berbagi pandangan. Beberapa gereja di Indonesia telah menjalankan program sosial lintas agama, seperti posyandu bersama, dapur umum, atau penyediaan air bersih untuk masyarakat sekitar yang melibatkan umat dari berbagai agama. Program ini tidak hanya membantu masyarakat secara materi, tetapi juga membangun solidaritas antarumat beragama.

Di Bali, beberapa pura telah menjadi tuan rumah dialog antaragama yang melibatkan pemuka agama Hindu, Islam, Kristen, dan Buddha. Dialog ini tidak hanya membahas isu-isu keagamaan, tetapi juga isu sosial seperti lingkungan dan kesehatan, yang relevan dengan semua agama. Meskipun rumah ibadah memiliki potensi besar untuk menjadi pusat moderasi, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan peran tersebut: *Pertama*, Beberapa jamaah atau pemimpin agama mungkin resisten terhadap perubahan atau inovasi dalam fungsi rumah ibadah. Untuk mengatasi ini, diperlukan pendekatan yang persuasif dan berbasis dialog, di mana manfaat dari penguatan fungsi rumah ibadah sebagai pusat moderasi dijelaskan dengan jelas (Khoeron, 2024a; Wahyudiana, 2024, 2024).

Kedua, Keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk dana maupun tenaga, sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan program-program moderasi di rumah ibadah. Solusinya adalah dengan membangun kemitraan dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung program-program ini. *Ketiga*, Ada risiko bahwa upaya untuk menguatkan fungsi moderasi rumah ibadah dapat dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Untuk menghindari hal ini, penting untuk menjaga agar program-program moderasi tetap bersifat inklusif dan tidak berpihak pada kelompok atau kepentingan tertentu.

Penguatan fungsi rumah ibadah sebagai pusat moderasi beragama di Indonesia memiliki dampak signifikan dalam membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kementerian Agama (Kemenag) telah mengembangkan berbagai strategi untuk mencapai tujuan ini, yang meliputi penguatan pendidikan, penggunaan ruang publik, dan pengembangan ekonomi umat. Dampak penguatan fungsi rumah ibadah, rumah ibadah berfungsi sebagai tempat pertemuan antar umat beragama, yang mendukung dialog dan pertukaran ide. Hal ini membantu menciptakan suasana harmonis di masyarakat yang majemuk. Rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan budaya. Ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berkolaborasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Contoh Strategi Penguatan Moderasi Beragama: *Pertama*, Penguatan pendidikan moderat, Kemenag mengusulkan pengembangan kurikulum pendidikan yang berorientasi moderat di lembaga pendidikan agama dan pesantren. Ini termasuk peningkatan pemahaman ajaran agama yang membawa kemaslahatan bagi umat. Menggunakan rumah ibadah sebagai tempat untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi dan moderasi melalui kegiatan diskusi, seminar, dan pertukaran budaya antar umat beragama. *Kedua*, Memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menggalang kerjasama antara berbagai komunitas agama dalam menyelenggarakan acara bersama yang mempromosikan toleransi dan saling pengertian. Rumah ibadah didorong untuk melakukan penelitian tentang isu-isu kontemporer yang relevan dengan masyarakat agar dapat merespons kebutuhan dan tantangan yang ada secara lebih efektif (Hatiman, 2024).

Dengan menjadi pusat moderasi, rumah ibadah dapat berkontribusi langsung dalam memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis, di mana perbedaan dihormati dan kerja sama antarumat ditingkatkan. Dengan menyebarkan ajaran agama yang moderat dan menolak ekstremisme, rumah ibadah dapat berperan sebagai benteng penangkal radikalisme. Ini akan membantu mengurangi potensi perekrutan oleh kelompok-kelompok ekstremis di masyarakat. Rumah ibadah yang berfungsi sebagai pusat moderasi juga dapat mendorong peningkatan partisipasi sosial dari jamaahnya. Ini akan memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan peran aktif umat dalam pembangunan masyarakat.

REKOMENDASI

Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan ini merekomendasikan agar Pemerintah, melalui Kementerian Agama, terus memperkuat strategi dalam membumikan moderasi beragama, khususnya di era digital. Meski berbagai kebijakan telah diterbitkan, kebijakan tersebut dinilai masih memerlukan penguatan agar dapat menjangkau semua sektor dan elemen masyarakat secara lebih merata. Untuk itu, langkah-langkah berikut dapat menjadi pertimbangan:

1. **Optimalisasi Kampanye Moderasi Beragama di Media Digital:** Pemerintah perlu memanfaatkan platform digital secara lebih efektif untuk menyampaikan pesan moderasi beragama. Hal ini mencakup penggunaan media sosial, portal resmi, dan aplikasi khusus yang dirancang untuk menyampaikan narasi positif tentang moderasi beragama.
2. **Peningkatan Literasi Digital di Kalangan Masyarakat:** Literasi digital harus menjadi bagian integral dari program moderasi beragama. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat mampu menyaring informasi secara kritis, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mengarah pada intoleransi atau ekstremisme.
3. **Kemitraan dengan Komunitas dan Influencer Digital:** Kementerian Agama dapat bermitra dengan komunitas digital dan influencer yang memiliki pengaruh di media sosial untuk menyebarluaskan nilai-nilai moderasi beragama secara kreatif dan persuasif.
4. **Pengembangan Materi Digital Interaktif:** Materi kampanye moderasi beragama perlu dikemas secara interaktif, seperti dalam bentuk video animasi, infografis, dan permainan edukatif berbasis aplikasi, sehingga menarik minat generasi muda.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan gerakan moderasi beragama dapat menjadi lebih efektif dalam membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan inklusif, sesuai dengan visi pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

PENUTUP

Gerakan Moderasi Beragama yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia adalah upaya strategis untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan inklusivitas dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Melalui berbagai program seperti penggunaan media, dialog lintas agama, peningkatan peran pendidikan, dan penguatan fungsi rumah ibadah, gerakan ini berusaha mencegah radikalisme dan ekstremisme yang dapat mengancam kerukunan sosial. Kementerian Agama memproduksi berbagai jenis konten edukatif yang dirancang dengan gaya yang menarik dan kreatif, seperti video pendek, infografis, meme, dan cerita interaktif. Konten ini mencakup topik-topik seperti pentingnya toleransi, bagaimana menghargai perbedaan, dan dampak negatif dari radikalisme. Untuk meningkatkan visibilitas pesan moderasi, kampanye tagar (#) seperti #ModerasiBeragama, #IndonesiaRukun, dan #TolakRadikalisme diluncurkan di berbagai platform.

Selain itu Kementerian Agama Republik Indonesia membuat program Rumah ibadah menjadi pusat moderasi dengan peran sebagai tempat pendidikan agama yang moderat, pusat dialog, dan kegiatan sosial yang inklusif. Sertifikasi penceramah juga diusulkan untuk memastikan bahwa pesan-pesan agama yang disampaikan mendukung moderasi dan kerukunan. Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaannya, dengan dukungan dari berbagai pihak, Kementerian Agama telah menginisiasi program sertifikasi bagi penceramah untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang agama dan mampu menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan benar. Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dakwah dan mencegah penyebaran paham radikal.

Kementerian Agama aktif dalam menjalin kerja sama internasional untuk mempromosikan dialog antaragama. Melalui forum-forum internasional, Indonesia berupaya menunjukkan komitmennya terhadap toleransi beragama dan perdamaian dunia. Kerja sama dengan negara-negara lain, termasuk di kawasan Timur Tengah dan Eropa. Ini termasuk pertukaran program pelatihan dan seminar yang bertujuan untuk berbagi praktik terbaik dalam moderasi beragama.

REFERENSI

- Abidin, A. Z. (2021). Nilai-nilai moderasi beragama dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018. *JIRA: Jurnal Inovasi dan Riset Akademik*, 2(5), 729–736. <https://doi.org/10.47387/jira.v2i5.135>
- Abror, Mhd. (2020). Moderasi beragama dalam bingkai toleransi. Rusydiah: *Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 137–148. <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174>
- Agus, A. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, 2(13).
- Alim, S. (2020). Revitalisasi dakwah Islam: Toleransi, harmonisasi, dan moderasi. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, 24(1), 71–89.
- Andi Saefulloh, A., Leo, K., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2022). Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama abad 21 melalui media sosial. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 5(8).
- Asrori, M. (2024). PKUB gandeng influencer untuk edukasi toleransi dan kerukunan umat. *Kementerian Agama*. <https://kemenag.go.id/nasional/pkub-gandeng-influencer-untuk-edukasi-toleransi-dan-kerukunan-umat-QioUw>
- Asyad, A. B. (2024). Kemenag RI beri penghargaan bidang moderasi beragama 2023, simak daftarnya! *Kementerian Agama*. <https://bimashindu.kemenag.go.id/berita-pusat/kemenag-ri-beri-penghargaan-bidang-moderasi-beragama-2023-simak-daftarnya-mMpeG>
- Azis, A., & Anam, A. K. (2021). Moderasi beragama berlandaskan nilai-nilai Islam. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Bari, F., & Jamila, I. F. (2023). Toleransi beragama era digital: (Studi atas podcast Habib Husein Ja'far Al-Haddar). *Jurnal Studi Pesantren*, 3(1), 55–68.
- BPKH, H. (2024). Sertifikat bagi penceramah digelar akhir bulan September. *Badan Pengelola Keuangan Haji*. <https://bpkh.go.id/sertifikat-bagi-penceramah-digelar-akhir-bulan-september/>
- Budiono, T. (2024). Kabag TU: Media jadi kelompok strategis penguatan moderasi beragama. *Kementerian Agama Jawa Barat*. https://jabar.kemenag.go.id/portal/isi_berita/kabag-tu-media-jadi-kelompok-strategis-penguatan-moderasi-beragama-xnP2VW

- Efendi, M. A. (2024). Menag Yaqut terima penghargaan satria transformasi digital dan moderasi beragama 2023. *Kementerian Agama*. <https://kemenag.go.id/nasional/menag-yaqut-terima-penghargaan-satria-transformasi-digital-dan-moderasi-beragama-2023-tLr3l>
- Faozan, A. (2020). Moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam untuk masyarakat multikultur. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 16(2), 219. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.170>
- Fatwa, H. (2024). Habib Husein Ja'far: Menjaga kerukunan berarti menjaga agama karena keragaman adalah anugerah Tuhan. *Islami.co*. <https://islami.co/habib-husein-jafar-menjaga-kerukunan-berarti-menjaga-agama-karena-keragaman-adalah-anugerah-tuhan/>
- Fiardhi, M. H. (2021). Peran dakwahtainment akun channel Youtube Jeda Nulis terhadap pemuda tersesat oleh Habib Husein Ja'far. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 3(2), 76–85.
- Firmansyah, A. (2024). Kemenag sebut bimtek penceramah untuk perkuat moderasi beragama. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/2190666/kemenag-sebut-bimtek-penceramah-untuk-perkuat-moderasi-beragama>
- Gokhan. (2023). Membumikan Islam moderat, membendung intoleransi dan radikalisme di Indonesia. *Harakatuna.com*. <https://harakatuna.com>
- Hakim, M. (2024). Memasifkan gerakan moderasi beragama. *Kementerian Agama Sulawesi Barat*. <https://sulbar.kemenag.go.id/opini/memasifkan-gerakan-moderasi-beragama-oleh-ilham-sopu-xNmW0>
- Haq, Z. A. (2022). Narasi toleransi beragama pada akun YouTube “Jeda Nulis.” *PUSAKA*, 10(1). <https://doi.org/10.31969/pusaka.v10i1.673>
- Hatiman, H. (2024). Zulfa Hudiyani jelaskan strategi penguatan moderasi beragama. *Kementerian Agama Bintan*. <https://kemenag.bintankab.go.id/berita/read/zulfa-hudiyani-jelaskan-strategi-penguatan-moderasi-beragama>
- Hefni, W. (2020). Moderasi beragama dalam ruang digital: Studi pengarusutamaan moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 1–22. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>
- Humas, H. (2024). Presiden Jokowi terbitkan Perpres 58/2023 tentang penguatan moderasi beragama. *Setkab.go.id*. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-terbitkan-perpres-58-2023-tentang-penguatan-moderasi-beragama/>

- Jan, R. H., & Hasan, Y. (2024). Manajemen pembangunan rumah ibadah di Kota Manado dan Gorontalo. *PT Lembaga Riset Indonesia*.
- Julian, A. (2024). Edy Rahmayadi terima penghargaan tokoh moderasi umat beragama dari UINSU. *Utamanews.com*. <https://utamanews.com/sosial-budaya/Edy-Rahmayadi-Terima-Penghargaan-Tokoh-Moderasi-Umat-Beragama-dari-UINSU>
- Junaedi, E. (2019). Inilah moderasi beragama perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Kalteng.kemenag. (2024, December 12). Kakanwil: Penguatan kompetensi penceramah, bukan sertifikasi penceramah. *Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah*. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/506097/Kakanwil-Penguatan-Kompetensi-Penceramah-Bukan-Sertifikasi-Penceramah>
- Karyudi Sutajah, P. (2024, November 1). Menag: Sertifikasi penceramah untuk menguatkan moderasi beragama di kalangan dai. *KAB News*. <https://kabnews.id/menag-sertifikasi-penceramah-untuk-kuatkan-moderasi-beragama-di-kalangan-dai/>
- Kemenag Bali. (2024, October 26). Penguatan moderasi beragama dijadikan prioritas oleh Kementerian Agama. *Kementerian Agama Provinsi Bali*. <https://bali.kemenag.go.id/provinsi/berita/55947/penguatan-moderasi-beragama-dijadikan-prioritas-oleh-kementerian-agama>
- Kemenag, K. (2024, December 15). Kemenag & Qatar tingkatkan kerjasama bidang agama dan pendidikan tinggi. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-qatar-tingkatkan-kerjasama-bidang-agama-dan-pendidikan-tinggi-4mw3zz>
- Kemenag, K. (2024, December 18). UIN Jakarta beri penghargaan Lukman Hakim Saifuddin, pencetus moderasi beragama di Indonesia. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/nasional/uin-jakarta-beri-penghargaan-lukman-hakim-saifuddin-pencetus-moderasi-beragama-di-indonesia-zw7ir5>
- Kementerian Agama. (2024, November 9). Kemenag: Penceramah bersertifikat bukan sertifikasi profesi. *Kementerian Agama Kota Surabaya*. <https://kemenagsurabaya.online/berita/detail/kemenag-penceramah-bersertifikat-bukan-sertifikasi-profesi>
- Khaerun Rijal, M. A. (2021). Fenomena intoleransi antar umat beragama serta peran sosial media akun Instagram jaringan Gusdurian Indonesia dalam menyampaikan pesan toleransi. *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(2), 103–132. <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i2.41>

- Khoeron, M. (2024, November 12). Akselerasi peningkatan mutu PTKKN, Ditjen Bimas Kristen perluas kerja sama internasional. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/internasional/akselerasi-peningkatan-mutu-ptkkn-ditjen-bimas-kristen-perluas-kerja-sama-internasional-lRpKz>
- Khoeron, M. (2024, November 19). Perkuat riset dan jaringan internasional, lima PTKN Kemenag teken kerja sama dengan kampus Ethiopia. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/internasional/perkuat-ri-set-dan-jaringan-internasional-lima-ptkn-kemenag-teken-kerja-sama-dengan-kampus-ethiopia-WOYoG>
- Khotimah, H. (2020). Internalisasi moderasi beragama dalam kurikulum pesantren. *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 62. <https://doi.org/10.19105/rjpai.v1i1.3008>
- Mandala, I., Witro, D., & Juraidi, J. (2024). Transformasi moderasi beragama berbasis digital 2024: Sebagai bentuk upaya memfilter konten radikalisme dan ekstremisme di era disrupsi. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 127–160. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1242>
- Massoweang, A. K. (2020). Merajut moderasi beragama dari tradisi pesantren. *PUSAKA*, 8(2), 211–226. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v8i2.421>
- MIMI, S. (2022). Peran tokoh agama dalam pendidikan moderasi beragama bagi generasi milenial melalui media YouTube. *UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri*.
- Muaz, & Ruswand, U. (2022). Moderasi beragama dalam pendidikan Islam. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 5(8).
- Rahim, A., & Indah, M. (2024). Pentingnya pendidikan literasi digital di kalangan remaja. *SABAJAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- RI, T. P. K. A. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Romadany, R. (2024, December 10). Indonesia – UEA segera tindak lanjut kerjasama bidang keagamaan. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/nasional/indonesia-uea-segera-tindak-lanjut-kerjasama-bidang-keagamaan-o5mbth>
- Sari, Y., & Prasetya, H. (2022). Literasi media digital pada remaja, ditengah pesatnya perkembangan media sosial. *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi*, 8(1).

- Sholihin, A., & Kurnia, H. (2023). Internet sebagai media penyebaran ideologi radikal: Dampak, tantangan, dan upaya penanggulangannya. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 3(1), 24–30. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v3i1.1844>
- Sobarna, I. (2020). Strategi kemandirian ekonomi Pondok Pesantren dalam penanggulangan radikalisme: Studi analisis keberadaan divisi ekonomi Pondok Pesantren Tarekat Al-Idrisiyah Tasikmalaya. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Suryadi, R. A. (2022). Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.17509/tk.v20i1.43544>
- Suryantoro, S. (2024, December 2). Moderasi beragama memperkuat kerukunan umat beragama di Kabupaten Kulon Progo. *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo*. <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/615/moderasi-beragama-memperkuat-kerukunan-umat-beragama-di-kabuapten-kulon-progo>
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi moderasi beragama di lembaga pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–348. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>
- Sya'bani, S. M. (2024, December 14). Kemenag gelar dialog pemuda lintas paham keagamaan Islam, ini rekomendasinya. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-gelar-dialog-pemuda-lintas-paham-keagamaan-islam-ini-rekomendasinya-aqe1b>
- Uinsgd.ac.id. (2024, December 8). Perkuat riset dan jaringan internasional, 5 PTKN Kemenag teken kerja sama dengan kampus Ethiopia. Salah satunya UIN Bandung ya! *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*. <https://uinsgd.ac.id/perkuat-ri-set-dan-jaringan-internasional-5-ptkn-kemenag-teken-kerja-sama-dengan-kampus-ethiopia-salah-satunya-uin-bandung-ya/>
- Wahyudiana, A. A. P. A. (2024, December 16). Jadilah pengelola rumah ibadah Hindu yang moderat dan modern. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://bimashindu.kemenag.go.id/berita-pusat/jadilah-pengelola-rumah-ibadah-hindu-yang-moderat-dan-modern-oTEXT>
- Wibowo, A. (2019). Kampanye moderasi beragama di Facebook: Bentuk dan strategi pesan. *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 85–103. <https://doi.org/10.32923/edugama.v5i2.971>

- Wibowo, R. W., & Nurjanah, A. S. (2021). Aktualisasi moderasi beragama abad 21 melalui media sosial. *MADANIA: Jurnal-Jurnal Keislaman*, 11(2). <http://dx.doi.org/10.24014/jiik.v11i2.13870>
- Wulandari, Y. (2024, December 11). Persepsi publik tentang digitalisasi layanan pusaka Kemenag. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(5), 1858–1872. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i5.3668>